

Komunikasi Polri-KPK dan Simalakama Rekening Gendut



podium

Oleh: **HARLIANTARA**
Dosen Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University.

KOMUNIKASI dan relasi antara dua lembaga negara dalam kondisi genting setelah calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan akan segera menjebloskan Komjen Pol Budi Gunawan ke tahanan. Untuk itu proses pemberkasan terus dikebut sembari memperhatikan aturan dalam KUHAP yang memberikan batas maksimal penahanan selama 120 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut proses penyidikan belum tuntas, maka tersangka dapat bebas demi hukum.

Pengenaan status tersangka terhadap calon Kapolri yang terjadi secara tiba-tiba menjelang proses *fit and proper test* calon Kapolri Budi Gunawan oleh DPR menjadi simalakama bagi Presiden Joko Widodo. Rivalitas yang hebat antara KPK dengan Polri yang sudah lama terjadi harus segera dicairkan dan diatasi dengan cara komunikasi yang intensif antara dua lembaga tersebut.

Masalah laten rekening gendut yang sudah lama ditudingkan kepada beberapa petinggi kepolisian mestinya tidak menjadi bahan politisasi setiap saat. Tetapi harus segera dikomunikasikan secara obyektif dan bebas dari muatan politik praktis. Komisioner KPK hendaknya konsisten, obyektif dan jangan angin-anginan dalam membedah rekening gendut polisi. Apalagi kasus rekening gendut itu sudah sangat lama terjadi dan ditudingkan kemudian berlarut-larut hingga kini.

Kehebohan tentang petinggi polisi yang memiliki rekening fantastis karena jumlahnya sangat besar terjadi pada awal pemerintahan Presiden SBY. Rekening fantastis itu sudah menjadi bola panas dan telah menjadi opini buruk yang menguras kredibilitas polisi dimata rakyat. Ironisnya sejak saat itu terjadi kebutaan komunikasi antara

Polri dan KPK. Komunikasi mesti segera dibangun, agar simalakama rekening gendut tidak mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK.

Saatnya Presiden Jokowi membentuk tim khusus yang menjadi jembatan komunikasi yang kokoh antara KPK dengan Polri. Para pakar komunikasi yang independen mesti segera dilibatkan untuk mencari idealisasi komunikasi dan sinergi yang baik. Agar sentimen rakyat terhadap polisi tidak semakin membesar.

Rivalitas antara KPK dengan Polri sangat merugikan kepentingan negeri ini. Apalagi tingkat kejahatan dan modus korupsi di negeri ini semakin besar dan canggih. Sehingga kedua lembaga di atas mestinya harus lebih fokus dan meningkatkan kapasitas masing-masing.

Adanya anggota kepolisian yang dikategorikan sebagai milyuner karena memiliki rekening gendut sebenarnya sudah lama terjadi. Bermula ketika Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sejumlah rekening bank milik sejumlah perwira Polri yang fantastis alias tidak wajar karena memiliki jumlah saldo hingga ratusan miliar rupiah. Sejak saat itu banyak kalangan dalam kepolisian yang sewot dan kebakaran jenggot. Sejak saat itu publik menuntut agar rekening itu ditelusuri secara mendalam dari mana asal-usulnya.

Presiden Jokowi diharapkan segera memanggil Ketua PPATK untuk lebih menggali lagi temuan. Apalagi temuan PPATK selama ini yang jumlahnya mencapai ratusan kasus dan diduga kuat terkait dengan tindak kejahatan pencucian uang belum ditindaklanjuti secara serius.

Realitas tentang kehidupan polisi yang mewah serta bergelimang dengan harta benda telah menjadi opini publik yang semakin membesar. Di negeri ini justru dianggap aneh jika ada perwira polisi yang tidak memiliki rekening gendut. Sangat langka petinggi polisi yang *track record*-nya bersih, hidup sederhana dan memiliki harta yang pas-pasan seperti halnya mantan Kapolri Hoegeng Iman Santosa.

Menurut otoritas moneter internasional Indonesia juga dikategorikan sebagai tempat yang empuk dan nyaman terkait pencucian uang haram. Diperkirakan jumlah uang haram yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang adalah antara 2 hingga 5 persen dari produk domestik bruto. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh seperti halnya Indonesia, dana haram tersebut dapat mereduksi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengganggu kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Besarnya presentasi jumlah uang haram yang telah dicuci itulah yang diduga bercokol pada rekening gendut. Indonesia yang masih marak oleh kasus pembalakan ilegal, pencurian ikan dan kekayaan laut, perjudian kakap, prostitusi, penyelundupan, obat terlarang dan lain-lain tentu saja menyuburkan praktik pencucian uang dalam jumlah yang amat besar. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kejahatan trans-nasional itu tidak mustahil terkait dengan uang haram dalam jumlah yang fantastis.

Masalah tindak pidana pencucian uang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *money laundering*, dampaknya bisa menghancurkan perekonomian negara. Sebagai bentuk kejahatan trans-nasional, ternyata ada aparat dan pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari modus pencucian uang tanpa peduli akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Sejarah pencucian uang sudah cukup tua. Istilah pencucian uang menjadi terkenal ketika Al Capone, seorang penjahat besar di Amerika Serikat pada masa lalu mencuci uang haram dari usaha kejahatannya dengan memakai tenaga akuntan yang bernama Meyer Lansky. Si akuntan itu mencuci uang hasil kejahatan Al Capone melalui usaha binatu atau *laundry*. Begitulah asal mula istilah *money laundering*. Dalam perkembangan jaman pencucian uang telah mengalami perubahan bentuk yang sangat beragam.

Pencucian uang menggerus pendapatan pemerintah dari pajak. Pada saat ini tindak pencucian uang di Indonesia sudah sangat mengawatirkan. Modus pencucian uang di Indonesia sudah sangat rapi dan berkolusi tingkat tinggi. Modus tersebut secara garis besar terdiri tiga fase, yakni fase *placement*, artinya memindahkan uang haram dari sumbernya untuk menghindari jejak dengan metode *smurfing*. Kemudian fase *layering*, yakni dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, properti,